

**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH,  
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA DINAS  
PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DPKAD)  
PADA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi*



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh

**Nama** : HARI MUNIRA  
**NPM** : 1605170090  
**Program Studi** : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238



**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 25 September 2021, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

**MEMUTUSKAN**

Nama : HARI MUNIRA  
NPM : 105170090  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsetrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK  
Judul Skripsi : PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DPKAD) PADA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

**Tim Penguji**

**Penguji I**

(PANDAPOTAN RITONGA, SE., M.Si)

**Penguji II**

(SITI AISYAH SIREGAR, SE., M.Ak)

**Pembimbing**

(Assoc. Prof. Dr. Hj. MAYA SARI, SE., M.Si., Ak., CA)

**Ketua**

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)

**Sekretaris**



(Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : HARI MUNIRA  
N.P.M : 1605170090  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK  
Judul Skripsi : PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI  
PEMERINTAH, TERHADAP KUALITAS LAPORAN  
KEUANGAN PADA DINAS PENGELOLA KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH (DPKAD) PADA PEMERINTAH  
KABUPATEN ACEH TENGAH

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian  
mempertahankan skripsi.

Medan, September 2021

Pembimbing Skripsi

(Dr. Hj. MAYA SARI, SE., M.Si.)

Diketahui/Disetujui  
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(Dr. ZULIA HANUM, SE., M.Si)



Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Il. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

**BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Hari Munira  
Npm : 1605170090  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik  
Nama Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Maya Sari, S.E., M.Si., Ak.  
Judul Penelitian : Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (DPKAD) Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	1. Latar belakang tambahkan teori, fenomena, indikator dari variabel, dan penelitian sebelumnya 2. Identifikasi masalah sesuaikan dengan indikator variabel. 3. Sesuaikan rumusan masalah dengan tujuan penelitian.	17 Februari 2021	
Bab 2	Tambahkan Teori yang update, tambahkan penelitian sebelumnya, dan Hipotesis sesuaikan dengan rumusan masalah	24 Februari 2021	
Bab 3	Tambahkan definisi operasional	3 Maret 2021	
Bab 4	Tambahkan penjelasan variabel kualitas laporan keuangan, pertajam penjelasan pembahasan, explore jawaban responden untuk mendukung hasil penelitian pada pembahasan, jawab pertanyaan identifikasi masalah	21 Juni 2021	
Bab 5	Kesimpulan diperbaiki lagi	2 Juli 2021	
Daftar Pustaka	Gunakan Mendeley	10 Agustus 2021	
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	Dilengkapi	10 Agustus 2021	
Persetujuan Sidang Meja Hijau	ACC Sidang Meja Hijau	20 Agustus 2021	

Diketahui oleh:  
Ketua Program Studi

(DR. Zuhra Hanum, S.E., M.Si)

Medan, 20 Agustus 2021  
Disetujui oleh:

(Dr. Hj. Maya Sari, S.E., M.Si., Ak.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hari Munira  
NPM : 1605170090  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik  
Judul Skripsi : **PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DPKAD) PADA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil **Plagiat** atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2021

Saya yang menyatakan



HARI MUNIRA

## **ABSTRAK**

### **PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DPKAD) PADA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH**

Oleh  
**HARI MUNIRA**  
**1605170090**

Permasalahan dalam penelitian ini adalah penataan keuangan daerah belum sepenuhnya memadai, dikarenakan tidak Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Pengelolaan Barang Milik Daerah belum sepenuhnya memadai, adanya Penyalahgunaan Uang Persediaan (UP) pada Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan keterlambatan sebelah paket pekerjaan rehabilitas/peningkatan jaringan irigasi dan satu paket pekerjaan pembukaan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang belum dikenakan denda keterlambatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah. Penelitian ini menggunakan sampel pegawai tetap Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dengan menggunakan teknik analisis regresi linear sederhana. Hasil penelitian menunjukkan Laporan Keuangan di Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Hal ini dikarenakan aparat pemerintah telah melaksanakan tentang standar akuntansi pemerintah dengan baik guna meningkatkan kualitas laporan keuangannya. Besarnya pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sebesar 19,8% sementara sisanya 80,2% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak masuk dalam model penelitian ini.

**Kata Kunci: Standar Akuntansi Pemerintah, Kualitas Laporan Keuangan**

## KATA PENGANTAR



### **Assalamualaikum'warahmatullahi'wabarakatuh**

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini. Shalawat beriringan salam saya ucapkan semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya yang telah memberikan dan menuntun kejalan yang benar dan semoga diyaumul akhir kita mendapatkan syafaat-Nya.

Skripsi merupakan kewajiban bagi penulis guna melengkapi tugas dan syarat-syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Stara-1 (S-1) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, serta memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Kepada Ayahanda tercinta Drs. H. Rijaluddin., MM. dan Ibunda tersayang Dra. Hj. Kamaliah yang telah merawat penulis dari kecil hingga besar seperti saat ini serta kepada abang-abang dan keluarga terima kasih banyak yang telah memberikan kasih sayang, motivasi serta dukungan dan doa kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini.

Dalam menyelesaikan proposal ini penulis banyak menemui kesulitan, namun berkat bantuan, bimbingan dan motivasi baik berupa materil maupun moril dari semua pihak. sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini dengan baik. Proposal ini dibuat agar peneliti dapat memberikan ilmu yang berguna

kepada siapapun termasuk penulis sendiri. Pada kesempatan ini penulis menyusun skripsi ini dengan judul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (DPKAD) Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah”

Pada kesempatan ini juga penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. Agusani M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **H. Januri SE, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. **Bapak Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan SE, M.Si** selaku PD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Hasrudy Tanjung SE, M.Si** selaku PD III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu **Dr. Zulia Hamum, SE, M.Si** selaku Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Riva Ubar Harahap, SE, M.Si, Ak, CA, CPA selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu **Assoc. Prof. Dr. Hj. Maya Sari S.E., M.Si., Ak. CA** selaku Dosen Pembimbing yang sudah memberikan ilmu dan motivasi kepada penulis.
8. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah membekali dan membantu penulis.

9. Seluruh keluarga penulis, abang Rizka Ridha S.STP, Rahmad Zarkasyi S.STP dan adik zahra, yola fahira yang telah memberikan dukungan dan menemani dalam penulisan
10. Seluruh teman-teman dan sahabat arif, habib dan teman-teman kelas b akuntansi pagi yang telah memberikan dukungan dan menemani dalam penulisan.

Penulis menyadari bahwa penulisan proposal ini masih jauh dari kesempurnaan dan tidak terlepas dari kesalahan, baik ditinjau dari penulisan susunan kata maupun data materi penyusunannya. Hal ini disebabkan karena keterbatasan ilmu dan kemampuan penulis miliki, namun dengan demikian mengharapkan dan menerima kritik serta saran yang bersifat membangun dari Bapak/Ibu Dosen, rekan-rekan Mahasiswa, dan pembaca agar lebih baik dalam proposal ini.

Akhirnya penulis mengucapkan Syukur Alhamdulillah dapat menyelesaikan skripsi ini dan berharap dapat bermanfaat bagi pembaca dan kita semua.

**Wassalamualaikum'Warahmatullahi'Wabarakatuh.**

Medan, September 2021

Peneliti

**HARI MUNIRA**  
**1605170090**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1.Latar Belakang Masalah.....	1
1.2.Identifikasi Masalah.....	6
1.3.Rumusan Masalah.....	6
1.4.Batasan Masalah .....	6
1.5.Tujuan Penelitian .....	7
1.6.Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
2.1 Uraian Teori .....	8
2.1.1 Kualitas Laporan Keuangan.....	8
2.1.1.1 Pengertian Laporan Keuangan .....	8
2.1.1.2 Tujuan Laporan Keuangan .....	9
2.1.1.3 Pengguna Laporan Keuangan .....	12
2.1.1.4 Komponen-komponen Laporan Keuangan .....	15
2.1.1.5 Indikator Kualitatif Laporan Keuangan .....	19
2.1.2 Standar Akuntansi Pemerintah ( SAP).....	27
2.1.2.1 Pengertian Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)....	27
2.1.2.2 Laporan Keuangan Pemerintah.....	34
2.1.2.3 Pengguna Laporan Keuangan .....	35
2.1.2.4 Tujuan Laporan Keuangan.....	35
2.1.2.5 Indikator Standar Akuntansi Pemerintah .....	37
2.2 Penelitian Terdahulu .....	38
2.3 Kerangka Konseptual.....	39
2.4 Perumusan Hipotesis Penelitian.....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>41</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	41
3.2 Definisi Operasional .....	41
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian .....	43
3.4 Populasi dan Sampel .....	43
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	44
3.6 Teknik Analisis Data.....	48
<b>BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>58</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	58
4.2 Pembahasan .....	75

<b>BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>79</b>
5.1 Kesimpulan .....	79
5.2 Saran .....	79

## **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Definisi Operasional .....	48
Tabel 3.2 Waktu Penelitian.....	50
Tabel 3.3 Skala Pengukuran Likert.....	52
Tabel 4.1 Skala Likert.....	61
Tabel 4.2 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	61
Tabel 4.3 Distribusi Responden Berdasarkan Usia.....	61
Tabel 4.4 Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	62
Tabel 4.5 Tabulasi Jawaban Responden Variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah(X) .....	63
Tabel 4.6 Tabulasi Jawaban Responden Kualitas Laporan Keuangan(Y).....	66
Tabel 4.7 Uji Validitas X .....	70
Tabel 4.8 Tabel Uji Validitas Y .....	71
Tabel 4.9 Tabel Uji Reliabilitas .....	71
Tabel 4.10 Analisis Regresi Linear .....	72
Tabel 4.11 Uji t .....	74
Tabel 4.12 Koefisien Determinasi .....	75

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara dapat diwujudkan melalui penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan. Kualitas informasi dalam laporan keuangan pemerintah tersebut sangat dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap standar akuntansi dan didukung oleh sebuah system akuntansi yang handal.

Untuk menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas dibutuhkan SDM yang memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintahan, keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah kompetensi aparatur pemerintah daerah yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan. Terbatasnya pegawai yang berlatar belakang pendidikan bidang akuntansi menjadikan kurangnya pemahaman/penguasaan aparatur Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mengelola keuangan daerah dengan baik dan benar.

Kurangnya pemahaman aparatur pemerintah daerah tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah menjadikan pendidikan dan pelatihan (diklat) sebagai upaya untuk mengatasi kesulitan dalam menyusun laporan keuangan. Hal ini selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil pasal 10 yang menyebutkan bahwa dalam upaya peningkatan kompetensi Pegawai Negeri Sipil, salah satu

upaya yang dilakukan adalah melalui pelaksanaan program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dalam jabatan.

Selain itu, hal yang mendasar dan penting dari penerapan akuntansi di dalam penyusunan laporan keuangan daerah salah satunya adalah sistem akuntansi. Sebagaimana pengertian dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) yaitu serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Permendagri No. 59 Tahun 2007).

Dalam mengelola keuangan daerah, pemerintah daerah menggunakan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Keuangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan yang bertujuan untuk memberikan informasi dalam pertanggungjawaban penggunaan dana.

Pada dasarnya Pemerintah Daerah telah berupaya untuk menyusun laporan keuangan dengan menggunakan sistem akuntansi keuangan daerah yang diharapkan mampu mewujudkan tercapainya transparansi dan akuntabilitas.

Pengembangan sebuah sistem yang tepat untuk dapat di implementasikan di daerah menghasilkan suatu system akuntansi keuangan daerah yang diharapkan dapat mengganti system akuntansi.

Masih buruknya pembenahan pengelolaan keuangan baik di pemerintah pusat maupun daerah saat ini tidak terlepas dari faktor penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan yang masih tergolong baru di lingkungan pemerintah.

Adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memahami mekanisme penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan menjadi kendala dalam mewujudkan LKPD yang berkualitas. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang baik, pemerintah daerah harus menyampaikan laporan pertanggung jawaban pemerintah yang baik dan benar dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan.

Melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki baik pada tingkatan sistem, kelembagaan, maupun individu, dan didukung dengan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah diharapkan pihak pengelola keuangan daerah khususnya bagian akuntansi mampu melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi dengan baik yang akhirnya bermuara pada terciptanya *good governance*.

Upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Laporan keuangan yang dihasilkan harus sesuai dengan SAP yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2010, menyatakan bahwa SAP dijelaskan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), yang dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan disusun berdasarkan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

Definisi Standar Akuntansi Pemerintahan menurut (Subagyo et al., 2018) menyatakan bahwa “Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan

persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia”.

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut menyatakan bahwa SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan pemerintah akan dilaporkan kepada DPR/DPRD dan selanjutnya dapat diakses oleh masyarakat setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Komponen laporan keuangan yang disampaikan sesuai PP 71 Tahun 2010 meliputi : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (Purba, 2010).

Menurut (Wati, 2014) untuk menghasilkan laporan yang memenuhi karakteristik kualitatif serta bermanfaat dalam pengambilan keputusan diperlukan kompetensi sumber daya manusia. Kompetensi sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting untuk merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan entitas yang bersangkutan. Sehingga dengan adanya kompetensi sumber daya manusia mendorong terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas yang bebas dari salah saji material dan pengertian yang menyesatkan. Sumber daya manusia merupakan kunci keberhasilan suatu instansi atau perusahaan karena sumber daya manusia pada suatu instansi memiliki nilai tinggi yang disebabkan oleh kemampuan, pengetahuan, dan ketrampilan.

Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah

daerah diharapkan mampu menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan dalam menilai akuntabilitas dan pengambilan keputusan. Pemerintah diwajibkan untuk memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang bertujuan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi.

Informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus memenuhi beberapa karakteristik yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu : relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Laporan keuangan yang berkualitas harus disusun sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang terdapat dalam SAP. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus mengacu kepada SAP yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tersebut yang berfungsi sebagai acuan untuk menilai apakah LKPD disusun telah sesuai dengan SAP.

Kabupaten Aceh Tengah merupakan salah satu dari 18 kabupaten di Provinsi Aceh yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini audit tersebut telah diperoleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah untuk ketujuh kalinya secara berturut-turut yaitu pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2019 atas laporan keuangan pemerintah daerah. Pemberian opini WTP dari BPK tersebut karena LKPD kabupaten Aceh Tengah dianggap telah memperhatikan kesesuaian SAP, kecukupan pengungkapan, dan kepatuhan terhadap peraturanperundang-undangan.

Walaupun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD untuk tahun 2018 mendapatkan opini WTP, namun tetap masih ada beberapa temuan dan rekomendasi dari BPK RI masih terdapatnya beberapa kelemahan yang berkaitan dengan Sistem SPI, maupun kepatuhan terhadap perundang-undangan. Diantara permasalahan-permasalahan yang perlu mendapat perhatian bersama diantaranya; Penataan keuangan daerah belum sepenuhnya memadai, pengelolaan Barang Milik Daerah belum sepenuhnya memadai, penyalahgunaan Uang Persediaan (UP) pada Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Keterlambatan sebelah paket pekerjaan rehabilitas/peningkatan jaringan irigasi dan satu paket pekerjaan pembukaan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang belum dikenakan denda keterlambatan.

Jika pemerintah menyusun laporan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip SAP maka kualitas informasi keuangan menjadi semakin baik. Penelitian mengenai pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan telah dilakukan oleh (Inapty, 2016). Hasil penelitian (Kusumah, 2016) menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan dan kualitas laporan keuangan pada SKPD/OPD Pemerintah Kota Tasikmalaya masuk kategori baik dan terdapat pengaruh antara penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk membuat suatu penelitian dengan judul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Penataan keuangan daerah belum sepenuhnya memadai, dikarenakan tidak menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periodepelaporan.
2. Pengelolaan Barang Milik Daerah belum sepenuhnya memadai,
3. Adanya Penyalahgunaan Uang Persediaan (UP) pada Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan
4. Keterlambatan sebelah paket pekerjaan rehabilitas/peningkatan jaringan irigasi dan satu paket pekerjaan pembukaan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang belum dikenakan denda keterlambatan.

## **1.3 Batasan Masalah**

Batasan masalah pada penelitian ini yaitu penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang tertuang dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) yang tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Aceh Tengah.

## **1.4 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : Apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan Keuangan

Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berbagai pihak, diantaranya :

#### 1. Bagi Instansi

Bagi Instansi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat sebagai evaluasi terkait pentingnya penerapan standar akuntansi pemerintah sebagai akuntabilitas pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

#### 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi, khususnya pada pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan.

## **BAB 2**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Uraian Teori**

##### **2.1.1 Kualitas Laporan Keuangan**

###### **2.1.1.1 Pengertian Laporan Keuangan**

Laporan keuangan merupakan suatu laporan yang berisikan informasi seputar keuangan dari sebuah organisasi. Laporan keuangan dibuat atau diterbitkan oleh perusahaan dari hasil proses akuntansi agar bisa menginformasikan keuangan dengan pihak dalam maupun pihak luar yang terkait.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 1 Tahun 2015 Tentang Penyajian Laporan Keuangan “laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.”

Adapun dalam (Fahmi, 2013) menurut Munawir mengatakan “laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan.” Dengan begitu laporan keuangan diharapkan akan membantu bagi para pengguna untuk membuat keputusan ekonomi bersifak finansial.

Disamping itu (Assauri, 2015) “Laporan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban manajemen sumber daya yang dipercayakan kepadanya.”

Adapun menurut (Thomas, 2013), menjelaskan pengertian laporan keuangan adalah “laporan keuangan merupakan hasil akhir dari siklus

akuntansi yang memberikan gambaran keuangan tentang suatu perusahaan yang secara periodik disusun oleh manajemen perusahaan. Laporan keuangan memiliki sifat historis yaitu memuat angka-angka tentang kinerja dan kondisi keuangan perusahaan pada masa yang telah lalu (historis).”

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat dikatakan bahwa laporan keuangan adalah hasil dari proses pencatatan yang ringkas berupa data keuangan dan aktivitas dari suatu perusahaan yang bertujuan untuk memberi gambaran mengenai kondisi keuangan, hasil usaha, serta kinerja perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu.

#### **2.1.1.2 Tujuan Laporan Keuangan**

Laporan keuangan yang sebenarnya merupakan produk akhir dari proses atau kegiatan akuntansi dalam suatu kesatuan. Proses akuntansi dimuali dari pengumpulan bukti-bukti transaksi yang terjadi sampai pada penyusunan laporan keuangan. Proses akuntansi tersebut harus dilaksanakan menurut cara tertentu yang lazim dan berterima umum sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

Dalam laporan keuangan dibuat dan disusun oleh akuntan. Para akuntan memahami dengan benar bahwa laporan keuangan yang dibuat tersebut akan menjadi informasi keuangan bagi banyak pihak. Oleh karena itu, seorang akuntan harus memahami dengan benar tujuan suatu pelaporan keuangan.

Dalam (Fahmi, 2013) Menurut PAPI (Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia) “Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja perubahan ekuitas, arus kas dan informasi

lainnya yang bermanfaat bagi pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.”

Sedangkan menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 2015 No. 1, menjelaskan bahwa “Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi.”

Adapun menurut APB *Statement* No. 4 dalam (Harahap, 2011), laporan ini bersifat deskriptif dan laporan ini banyak mempengaruhi studi-studi berikutnya tentang tujuan laporan keuangan. Dalam laporan ini tujuan laporan keuangan digolongkan sebagai berikut:

1) Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari laporan keuangan adalah untuk menyajikan laporan posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan lainnya secara wajar dan sesuai dengan GAAP.

2) Tujuan Umum

Adapun tujuan umum laporan keuangan disebutkan sebagai berikut:

- 1) Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber-sumber ekonomi, dan kewajiban perusahaan dengan maksud:
  - a) Untuk menilai kekuatan dan kelemahan perusahaan;
  - b) Untuk menunjukkan posisi keuangan dan kelemahan perusahaan;

- c) Untuk menilai kemampuannya untuk menyelesaikan utang-utangnya;
  - d) Menunjukkan kemampuan sumber-sumber kekayaannya yang ada untuk pertumbuhan perusahaan.
- 2) Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber kekayaan bersih yang berasal dari kegiatan usaha dalam mencari laba dengan maksud:
- e) Memberikan gambaran tentang dividen yang diharapkan pemegang saham;
  - f) Menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban kepada kreditor, supplier, pegawai, pajak, mengumpulkan dana untuk perlunasan perusahaan;
  - g) Memberikan informasi kepada manajemen untuk digunakan dalam pelaksanaan fungsi perencanaan dan pengawasan;
  - h) Menunjukkan tingkat kemampuan perusahaan mendapatkan laba dalam jangka panjang.
- 3) Menaksir informasi keuangan yang dapat digunakan untuk menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba.
- 4) Memberikan informasi yang diperlukan lainnya tentang perubahan harta dan kewajiban.
- 5) Mengungkapkan informasi relevan lainnya yang dibutuhkan para pemakai laporan.

### 3) Tujuan Kualitatif

Tujuan kualitatif yang dirumuskan APB *Statement* No. 4 adalah *Relevance*, *Understandability*, *Verifiability*, *Neutrality*, *Timeliness*, *Comparability* dan *Completeness*. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh suatu perusahaan harus memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan tersebut. Sesuai dengan itu, ada beberapa standar kualitas yang harus dipenuhi menurut Pura (2013:11), yaitu:

#### a. Dapat dipahami

Laporan keuangan disajikan dengan cara yang mudah dipahami, dengan anggapan bahwa pemakainya telah memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis.

#### b. Relevan

Maksudnya adalah bahwa informasi keuangan yang diberikan dapat memenuhi kebutuhan pemakai dan dapat membantu pemakai dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu serta masa yang akan datang.

#### c. Keandalan/Reliabilitas

Informasi keuangan yang dihasilkan suatu perusahaan harus diuji kebenarannya oleh seorang pengukur yang independen dengan metode pengukuran yang tetap.

d. Dapat dibandingkan/ Komparabilitas

Penyajian laporan keuangan dapat membandingkan laporan keuangan antar periode, sehingga dapat mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan.

e. Netral

Informasi keuangan harus ditujukan kepada tujuan umum pengguna, bukan ditujukan kepada pihak tertentu saja. Laporan keuangan tidak boleh berpihak pada salah satu pengguna laporan keuangan tersebut.

f. Tepat waktu

Laporan keuangan harus dapat disajikan sedini mungkin, agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan perusahaan sesuai dengan waktu dibutuhkan informasi tersebut.

g. Lengkap

Informasi keuangan harus menyajikan semua fakta keuangan yang penting, sekaligus menyajikan fakta-fakta tersebut sedemikian rupa sehingga akan menyesatkan pembacanya.

Laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan harus sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim, agar pihak perusahaan, manajemen, dapat mengambil keputusan dari laporan dan pihak-pihak yang memakai informasi agar laporan keuangan tersebut tidak menyesatkan.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dikatakan bahwa laporan keuangan disusun dengan tujuan untuk menyediakan informasi keuangan

mengenai suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai pertimbangan dalam pembuatan keputusan ekonomi.

### **2.1.1.3 Pengguna Laporan Keuangan**

Laporan keuangan merupakan komoditi yang bermanfaat dan dibutuhkan oleh masyarakat, karena masyarakat dapat memberikan informasi yang dibutuhkan penggunaannya dalam dunia bisnis yang dapat menghasilkan keuntungan. Laporan keuangan disajikan kepada pihak yang berkepentingan termasuk manajemen, kreditur, pemerintah dan pihak-pihak lainnya.

Menurut (Harahap, 2011), pengguna laporan keuangan antara lain sebagai berikut:

#### 1) Pemilik perusahaan

Bagi pemilik perusahaan laporan keuangan dimaksudkan untuk:

- a) Menilai prestasi atau hasil yang diperoleh manajemen perusahaan;
- b) Mengetahui hasil dividen yang akan diterima;
- c) Menilai posisi keuangan perusahaan dan pertumbuhannya;
- d) Mengetahui nilai saham dan laba perlembar saham;
- e) Sebagai dasar untuk memprediksi kondisi perusahaan dimasa yang akan datang;
- f) Sebagai dasar untuk mempertimbangkan menambah dan mengurangi investasi.

#### 2) Manajemen perusahaan

Bagi manajemen perusahaan laporan keuangan digunakan untuk:

- a) Alat untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan kepada pemilik;

- b) Mengatur tingkat biaya dan setiap kegiatan operasi perusahaan, divisi, bagian segmen tertentu;
- c) Mengukur tingkat efisiensi dan tingkat keuntungan perusahaan, divisi, bagian, atau segmen tertentu;
- d) Menilai hasil kerja individu yang diberikan tugas dan tanggung jawab;
- e) Untuk menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan perlu tidaknya diambil kebijaksanaan baru;
- f) Memenuhi ketentuan dalam UU, peraturan Anggaran Dasar, Pasar Modal, dan Lembaga regulator lainnya.

3) Investor

Bagi investor laporan keuangan dimaksudkan untuk:

- a) Menilai kondisi keuangan dan hasil usaha perusahaan;
- b) Menilai kemungkinan menanamkan dana dalam perusahaan;
- c) Menilai kemungkinan menanamkan investasi (menarik investasi) dari perusahaan;
- d) Menjadi dasar memprediksi kondisi perusahaan di masa yang akan datang.

e) Kreditur atau Banker

Bagi kreditur, banker, atau supplier laporan keuangan digunakan untuk:

- a) Menilai kondisi keuangan dan hasil usaha perusahaan dalam jangka pendek maupun dalam jangka waktu panjang;

- b) Menilai kualitas jaminan kredit/investasi untuk menopang kredit yang akan diberikan;
  - c) Melihat dan memprediksi prospek keuntungan yang mungkin diperoleh dari perusahaan atau menilai rate of return perusahaan;
  - d) Menilai kemampuan likuiditas, solvabilitas, rentabilitas perusahaan sebagai
  - e) dasar dalam pertimbangan keputusan kredit;
  - f) Menilai sejauh mana perusahaan mengikuti perjanjian kredit yang sudah disepakati.
- f) Pemerintah dan Regulator

Bagi pemerintah atau regulator laporan keuangan dimaksudkan untuk:

- a) Menghitung dan menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar;
  - b) Sebagai dasar dalam menetapkan kebijakan-kebijakan baru;
  - c) Menilai apakah perusahaan memerlukan bantuan atau tindakan lain;
  - d) Menilai kepatuhan perusahaan terhadap aturan yang ditetapkan;
  - e) Bagi lembaga pemerintah lainnya bisa menjadi bahan penyusunan data dan statistik.
- g) Analisis, Akademis, Pusat Data Bisnis

Para analis, akademis, dan juga lembaga-lembaga pengumpulan data bisnis laporan keuangan penting sebagai bahan atau sumber

informasi yang akan diolah sehingga menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi analisa, ilmu pengetahuan, dan komoditi informasi.

Adapun menurut (Purba, 2010) akuntansi menyediakan cara untuk mengumpulkan informasi ekonomi dan melaporkannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap informasi keuangan adalah:

a. Investor

Investor adalah orang-orang atau lembaga yang akan menanamkan modalnya dalam suatu perusahaan, biasanya dalam bentuk yang atau aset lainnya. Investor membutuhkan informasi laporan keuangan untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan, atau menjual investasi di perusahaan tertentu. Oleh karena itu, informasi yang dibutuhkan investor mencakup (1) laba usaha yang diperoleh selama beberapa tahun terakhir dan (2) pertumbuhan kekayaan perusahaan.

b. Karyawan

Karyawan adalah orang yang bekerja dalam perusahaan dan memperoleh imbalan jasa dari perusahaan tersebut. Karyawan membutuhkan informasi laporan keuangan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun, dan kesempatan kerja. Jadi, informasi yang dibutuhkan berupa (1) laba perusahaan yang diperoleh dan (2) besarnya balas jasa yang diberikan perusahaan.

c. Kreditor

Kreditor adalah orang atau perusahaan yang memberikan pinjaman dana kepada perusahaan untuk berbagai keperluan usaha. Kreditor membutuhkan informasi laporan keuangan untuk memutuskan apakah jumlah pinjaman yang diberikan akan dibayar oleh perusahaan pada saat tanggal jatuh tempo. Dengan demikian, informasi yang diperlukan mencakup:

1. Besarnya kekayaan perusahaan,
2. Kemampuan menghasilkan laba,
3. Perbandingan utang dengan kekayaan perusahaan.

d. Pemasok (*Supplier*)

Pemasok adalah orang atau perusahaan yang menjual berbagai barang kepada perusahaan. Untuk meningkatkan omset penjualan, pemasok biasanya menjual barang secara kredit. Oleh karena itu, mereka membutuhkan informasi laporan keuangan untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut mampu membayar kredit yang diberikan.

Informasi yang dibutuhkan berupa:

1. Besarnya kekayaan perusahaan,
2. Kemampuan menghasilkan laba,
3. Perbandingan utang terhadap kekayaan perusahaan.

e. Pemerintah

Pemerintah adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk membuat peraturan usaha dan hal-hal yang terkait dengannya.

Pemerintah membutuhkan informasi laporan keuangan untuk

menentukan jumlah pajak yang akan dikenakan terhadap suatu perusahaan. Dengan demikian, informasi yang dibutuhkan berupa:

1. Laba usaha yang diperoleh,
2. Beban yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan.

f. Masyarakat

Masyarakat adalah orang-orang yang mendapat dampak dari keberadaan suatu perusahaan. Mereka membutuhkan informasi laporan keuangan untuk mengetahui kecenderungan dan perkembangan kemakmuran perusahaan serta segala aktivitasnya.

Dari penjelasan tersebut dapat dibutuhkan bahwa laporan keuangan sangat berguna bagi semua pihak yang berkepentingan, baik pihak internal maupun pihak eksternal. Laporan keuangan dapat memberikan informasi kepada para penggunanya sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

#### **2.1.1.4 Komponen-komponen Laporan Keuangan**

Laporan keuangan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 2015 No. 1, terdiri dari komponen-komponen berikut ini:

- a) Laporan posisi keuangan pada akhir periode;
- b) Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode;
- c) Laporan perubahan ekuitas selama periode;
- d) Laporan arus kas selama periode;
- e) Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan ini;

- f) Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya.

Komponen-komponen dari laporan keuangan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Laporan posisi keuangan

Laporan posisi keuangan minimal mencakup penyajian jumlah pos-pos berikut:

- 1) Aset tetap;
- 2) Properti investasi;
- 3) Aset tak berwujud;
- 4) Aset keuangan;
- 5) Investasi dengan menggunakan metode ekuitas;
- 6) Persediaan;
- 7) Piutang dagang dan piutang lainnya;
- 8) Kas dan setara kas;
- 9) Total aset yang diklarifikasikan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual dan aset yang termasuk kelompok dalam pelepasan yang diklarifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 58: Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan;
- 10) Utang dagang dan terutang lain;

- 11) Provisi;
- 12) Liabilitas keuangan;
- 13) Liabilitas dan aset untuk pajak kini sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 46: Pajak Penghasilan;
- 14) Liabilitas dan aset pajak tangguhan, sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 46;
- 15) Liabilitas yang termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 58;
- 16) Kepentingan nonpengendali, disajikan sebagai bagian dari ekuitas; dan
- 17) Modal saham dan cadangan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

b) Laporan laba rugi komprehensif

Laporan laba rugi komprehensif minimal mencakup penyajian jumlah pos-pos berikut untuk periode:

- a. Pendapatan
- b. Biaya keuangan;
- c. Bagian laba rugi dari entitas asosiasi dan ventura bersama yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas;
- d. Beban pajak;
- e. Suatu jumlah tunggal yang mencakup total dari:
  - (i) Laba rugi setelah pajak dari operasi yang dihentikan; dan

- (ii) Keuntungan atau kerugian setelah pajak yang diakui dari pengukuran nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau dari pelepasan aset atau kelompok lepasan dalam rangka operasi yang dihentikan;
  - f. Laba rugi;
  - g. Setiap komponen dari pendapatan komprehensif lain yang diklasifikasikan sesuai dengan sifat;
  - h. Bagian pendapatan dari komprehensif lain dari entitas asosiasi dan bentura bersama yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas;
  - i. Total laba rugi komprehensif.
- c) Laporan Perubahan Ekuitas
- Entitas menyajikan laporan perubahan ekuitas yang menunjukkan:
- a. Total laba rugi komprehensif selama suatu periode, yang menunjukkan secara terpisah total jumlah yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepada kepentingan nin pengendali;
  - b. Untuk setiap komponen ekuitas, pengaruh penerapan retrospektif atau penyajian kembali secara retrospektif yang diakui sesuai dengan PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan;
  - c. Untuk setiap komponen ekuitas, rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada awal dan akhir periode, secara terpisah mengungkapkan masing-masing perubahan yang timbul dari:

- (i) Laba rugi;
- (ii) Masing-masing pos pendapatan komprehensif lain; dan
- (iii) Transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik yang menunjukkan secara terpisah kontribusi dari pemilik dan distribusi kepada pemilik dan perubahan hak kepemilikan pada entitas anak yang tidak menyebabkan hilangnya pengendalian.

d) Laporan Arus Kas

Informasi arus kas memberikan dasar bagi pengguna keuangan untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas dan kebutuhan entitas dalam menggunakan arus kas tersebut.

e) Catatan Atas Laporan Keuangan

- 1) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu;
- 2) Mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh SAK yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan; dan
- 3) Memberikan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan.

f) Pengungkapan Kebijakan Akuntansi

Entitas mengungkapkan dalam ringkasan kebijakan akuntansi signifikan:

- 1) Dasar pengukuran yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan;

- 2) Kebijakan akuntansi lain yang diterapkan yang relevan untuk memahami laporan keuangan.

#### **2.1.1.5 Indikator Kualitatif Laporan Keuangan**

Menurut (Rudianto, 2012) setiap perusahaan memiliki bidang usaha dan karakteristik yang berbeda satu dengan lainnya, sehingga rincian laporan keuangan satu perusahaan dengan perusahaan lainnya juga berbeda. Namun, laporan keuangan yang dihasilkan oleh setiap institusi harus memenuhi beberapa standar kualitas seperti:

- 1) dapat dipahami,
- 2) relevan.
- 3) matrealitas,
- 4) keandalan/reliabilitas,
- 5) substansi mengungguli bentuk,
- 6) pertimbangan yang sehat,
- 7) kelengkapan,
- 8) dapat dibandingkan,
- 9) tepat waktu,
- 10) keseimbangan antara biaya dan manfaat.

Laporan keuangan mengungkapkan informasi yang penting bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Agar suatu laporan keuangan dapat memberi manfaat bagi para pemakainya, maka laporan keuangan tersebut harus mempunyai nilai informasi yang berkualitas, harus memenuhi karakteristik laporan keuangan tentunya, dan berguna dalam pengambilan keputusan.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 2015 No. 1, karakteristik kualitatif merupakan ciri khas membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Terdapat empat karakteristik kualitatif pokok yaitu:

1. Dapat dipahami
2. Relevan
3. Keandalan
4. Dapat diperbandingkan

Uraian mengenai kutipan diatas adalah sebagai berikut:

1. Dapat dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna. Misalnya, pengguna memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta keinginan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dipahami oleh pengguna tertentu.

2. Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam proses pengambilan keputusan. Informasi mempunyai kualitas relevan bila dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan atau mengoreksi

hasil evaluasi mereka di masa lalu. Peran informasi dalam peramalan dan penegasan, berkaitan satu sama lain. Informasi yang sama juga berperan dalam memberikan penegasan terhadap prediksi yang lalu, misalnya, tentang bagaimana struktur keuangan perusahaan diharapkan tersusun atau tentang hasil dari operasi yang direncanakan.

Informasi posisi keuangan dan kinerja masa lalu sering kali digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja masa depan. Untuk memiliki nilai prediktif, informasi tidak perlu harus dalam bentuk ramalan eksplisit. Namun demikian, kemampuan laporan keuangan untuk membuat prediksi dapat ditingkatkan dengan menampilkan informasi tentang transaksi dan peristiwa masa lalu. Informasi yang relevan harus memenuhi karakteristik materialitas.

Relevansi informasi dipengaruhi oleh hakikat dan materialitasnya. Informasi dipandang material jika kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang dinilai sesuai dengan situasi khusus dari kelalaian dalam mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat. Karenanya, materialitas lebih merupakan suatu ambang batas atau titik pemisah dari pada suatu karakteristik kualitatif pokok yang harus dimiliki agar informasi dipandang berguna.

### 3. Keandalan

Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (reliable). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan penggunaannya sebagai penyajian yang tulus atau jujur dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memiliki karakteristik berikut:

#### a. Penyajian Jujur

Agar dapat diandalkan, informasi harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Informasi keuangan pada umumnya tidak luput dari risiko penyajian yang dianggap kurang jujur dari apa yang seharusnya digambarkan. Hal tersebut bukan disebabkan karena kesengajaan untuk menyesatkan, tetapi lebih merupakan kesulitan yang melekat dalam mengidentifikasi transaksi serta peristiwa lainnya yang dilaporkan atau dalam menyusun atau menerapkan ukuran dan teknik penyajian yang sesuai dengan makna transaksi dan peristiwa tersebut.

#### b. Substansi Mengungguli Bentuk

Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka

peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. Substansi transaksi atau peristiwa lain tidak selalu konsisten dengan apa yang tampak dari bentuk hukum.

c. Netralitas

Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pengguna, dan tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa pihak, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan yang berlawanan.

d. Pertimbangan Sehat

Penyusunan laporan keuangan adakalanya menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian yang dihadapi dalam penyusunan laporan keuangan diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dan dengan menggunakan pertimbangan sehat (prudence) dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan perkiraan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aktiva atau penghasilan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban atau beban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya pembentukan cadangan tersembunyi atau penyisihan (provision) berlebihan, dan sengaja menetapkan aktiva atau

penghasilan yang lebih rendah atau pencatatan kewajiban atau beban yang lebih tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral, dan karena itu, tidak mempunyai kualitas andal.

e. Kelengkapan

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan area itu tidak dapat diandalkan dan tidak sempurna ditinjau dari segi relevansi.

4. Dapat Dibandingkan

Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (fraud) posisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk entitas tersebut, antar periode entitas yang sama, dan untuk entitas yang berbeda.

Implikasi penting dari karakteristik kualitatif dapat diperbandingkan adalah bahwa pengguna harus mendapat informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan perubahan kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut. Ketaatan pada standar akuntansi keuangan, termasuk

pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh perusahaan, membantu pencapaian daya banding.

Sedangkan menurut (Pura, 2014) karakteristik merupakan ciri khas yang memberikan informasi laporan keuangan berguna bagi pemakai. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh suatu perusahaan harus memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan tersebut. Sesuai dengan itu, ada beberapa indikator standar kualitas yang harus dipenuhi, yaitu:

a. Dapat dipahami

Laporan keuangan disajikan dengan cara yang mudah dipahami, dengan anggapan bahwa pemakainya telah memiliki pengetahuan yang memadai dengan aktivitas ekonomi dan bisnis.

b. Relevan

Maksudnya adalah bahwa informasi keuangan yang diberikan dapat memenuhi kebutuhan pemakai dan dapat membantu pemakai dan mengevaluasi peristiwa masa lalu serta masa yang akan datang.

c. Keandalan/Reliabilitas

Informasi keuangan yang dihasilkan suatu perusahaan harus diuji kebenarannya oleh seorang pengukur yang independen dengan metode pengukurann yang tetap.

d. Dapat dibandingkan. Komparabilitas

Penyajian laporan keuangan dapat membandingkan laporan keuangan antar periode, sehingga dapat mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan.

e. Netral

Informasi keuangan harus ditujukan kepada tujuan umum pengguna, bukan ditujukan kepada pihak tertentu saja. Laporan keuangan tidak boleh berpihak pada salah satu pengguna laporan keuangan tersebut.

f. Tepat waktu

Laporan keuangan harus dapat disajikan sedini mungkin, agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan perusahaan sesuai dengan waktu dibutuhkan informasi tersebut.

g. Lengkap

Informasi keuangan harus menyajikan semua fakta keuangan yang penting, sekaligus menyajikan fakta-fakta tersebut sedemikian rupa sehingga tidak akan menyesatkan pembaca.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diketahui bahwa di dalam sebuah laporan keuangan yang baik dan dapat dikatakan bermanfaat bagi penggunanya jika laporan keuangan yang disajikan tersebut mudah dipahami dan relevan atau bermanfaat bagi penggunanya. Selain itu, netralitas (informasi keuangan yang disajikan tidak hanya berguna untuk kebutuhan satu pihak saja akan tetapi untuk semua pihak), serta laporan keuangan antar periode dapat diperbandingkan sehingga dapat teridentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan perusahaan.

## **2.1.2 Standar Akuntansi Pemerintah ( SAP)**

### **2.1.2.1 Pengertian Standar Akuntansi Pemerintah ( SAP)**

Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang kemudian mengalami perubahan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan disusun berdasarkan pada kerangka konseptual akuntansi pemerintahan, merupakan upaya untuk menyamakan sikap dan visi dalam melaksanakan aturan-aturan tersebut terdahulu, dalam paradigma pemerintahan daerah yang bertumpu pada nilai-nilai demokratisasi, pemberdayaan, dan pelayanan. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintah yang bersih.

Penetapan peraturan ini sekaligus merupakan terobosan baru dalam sejarah pengelolaan keuangan nasional. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005, SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah. Dengan berlakunya SAP, laporan dari pemerintah pusat dan daerah yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Dengan demikian, laporan keuangan dari pemerintah akan lebih mudah dipahami dan dapat diukur tingkat kualitasnya berdasarkan standar- standar akuntansi pemerintahan tersebut.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP, terdapat kerangka konseptual dan tiga belas PSAP yang dijelaskan sebagai berikut.

1) Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah

Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan SAP, dan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), dalam menyusun laporan keuangan, memeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur PSAP.

2) PSAP No. 01 Penyajian Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual sepenuhnya tetap menyajikan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis kas. Komponen pokok laporan keuangan terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

3) PSAP No. 02 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Laporan realisasi anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos yaitu: pendapatan, belanja, transfer, surplus atau defisit, penerimaan pembiayaan,

pengeluaran pembiayaan, pembiayaan neto, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA /SiKPA).

4) PSAP No. 03 Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran.

5) PSAP No. 04 Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam CaLK.

6) PSAP No. 05 Akuntansi Persediaan

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau penguasaannya berpindah. Persediaan disajikan sebesar Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian; Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

7) PSAP No. 6 Akuntansi Investasi

Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek diakui sebagai

penerimaan kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan. Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki pemerintah dinilai dengan menggunakan nilairata-rata.

8) PSAP No. 07 Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

9) PSAP No. 08 Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan jika: besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh biaya perolehan tersebut.

10) PSAP No. 09 Akuntansi Kewajiban

Pelaporan keuangan untuk tujuan umum harus menyajikan kewajiban yang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat ini, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban

dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

11) PSAP No. 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa

Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam dua jenis yaitu: kesalahan yang tidak berulang dan kesalahan yang berulang dan sistemik. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam dua harus diungkapkan secara terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Peristiwa luar biasa harus memenuhi seluruh persyaratan berikut.

- a) Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
- b) Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadiberulang;
- c) Berada di luar kendali atau pengaruh entitas;
- d) Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisiaset/kewajiban.

Hakikatnya, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa harus diungkapkan secara terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

12) PSAP No. 11 Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan konsolidasi disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode

sebelumnya. Dalam standar akuntansi pemerintahan, CaLK harus mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan. Ungkapan-ungkapan yang diperlukan dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus sesuai dengan pedoman pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

### 13) PSAP No.12 Laporan Operasional

Laporan operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan sebagai berikut.

- a) Pendapatan-LO
- b) Beban
- c) Surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya
- d) Kegiatan nonoperasional
- e) Surplus/defisit operasional sebelum pos luarbiasa
- f) Pos luarbiasa
- g) Surplus/defiit laporan operasional

Periode pelaporan laporan operasional disajikan sekurang- kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, apabila tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan operasional tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih pendek dari satu tahun, entitas harus mengungkapkan informasi sebagai berikut:

- a) Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;

- b) Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam laporan operasional dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

14) PSAP No.13 Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)

Laporan keuangan BLU adalah bentuk pertanggungjawaban BLU yang disajikan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, sehingga BLU kini melaporkan 7 laporan keuangan yang disajikan dengan dasar akrualbasis.

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam menyusun standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Adapun delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yaitu:

- a) Basis akuntansi
- b) Nilai historis
- c) Realisasi
- d) Substansi mengungguli bentuk
- e) Perioditas
- f) Konsistensi
- g) Pengungkapan lengkap
- h) Penyajian wajar

### **2.1.2.2 Laporan Keuangan Pemerintah**

Definisi laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 sebagai berikut “laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan”. Laporan keuangan pemerintah daerah itu sendiri merupakan gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas tersebut. Salah satu pengguna laporan keuangan pemerintah daerah adalah pemerintah pusat. Pemerintah pusat berkepentingan dengan laporan keuangan pemerintah daerah karena pemerintah pusat telah menyerahkan sumber daya keuangan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Komponen dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Laporan Realisasi APBD (LRA)
- b. Neraca
- c. Catatan atas Laporan Keuangan
- d. Laporan Arus Kas (LAK)
- e. Perubahan Saldo Anggaran Lebih (PSAL)
- f. Laporan Operasional

### **2.1.2.3 Pengguna Laporan Keuangan**

- 1) Pemerintah daerahInternal
- 2) Pemerintah Daerah Eksternal, seperti
  - a) DPRD
  - b) BPK
  - c) Investur, Kreditur, danDonatur
  - d) Analisis ekonomi dan pemerhati pemda
  - e) Pemerintahan provinsi

- f) Pemerintah pusat
- 3) Masyarakat
- 4) Sistem Akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (SA- PPKD) sebagai pengguna anggaran yang akan menghasilkan laporan keuangan PPKD yang terdiri dari LRA PPKD, Neraca PPKD, dan CaLKPPKD.
- 5) SA-Konsolidator sebagai wakil pemda (entitas pelaporan) yang akan mencatat transaksi resiprokal antara SKPD dan PPKD (selaku BUD) dan melakukan proses konsolidasi laporan keuangan (laporan keuangan dari seluruh SKPD dan PPKD menjadi laporan keuangan pemda yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD (LRA), Neraca Pemda, LAK, dan CaLKPemda).

#### **2.1.2.4 Tujuan Laporan Keuangan**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan umum laporan keuangan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang berguna bagi pengguna dalam evaluasi keputusan dan sebagai alat ukur akuntabilitas entitas

sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a) Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber dayakeuangan;
- b) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruhpengeluaran;
- c) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- d) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- e) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periodepelaporan.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait.

### **2.1.2.5 Indikator Standar Akuntansi Pemerintah**

Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, Catatan atas Laporan Keuangan harus mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan. Ungkapan-ungkapan yang diperlukan dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus sesuai dengan pedoman pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Indikator Standar Akuntansi Pemerintah mengungkapkan/ menyajikan/ menyediakan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengungkapkan informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi.
2. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro.
3. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
4. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
5. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan
6. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan
7. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang

wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan

## 2.2 Penelitian Terrdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Yosefrinaldi, 2013)	Pengaruh Moral Reasoning, Skeptisme Professional dan Kecerdasan Spiritual Terhadap Kualitas Audit Pada BPKP Provinsi Sumatera Utara	Berdasarkan hasil penelitian <i>moral reasoning</i> berpengaruh terhadap kualitas audit, skeptisme profesional berpengaruh terhadap kualitas audit, kecerdasan spiritual auditor berpengaruh terhadap kualitas audit, dan <i>moral reasoning</i> , skeptisme profesional, dan kecerdasan spiritual auditor berpengaruh secara simultan terhadap kualitas audit
2	(Amries & Tanjung, 2015)	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada SKPD Kota Dumai)	Hasil pengujian hipotesis pertama membuktikan bahwa variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Dumai..
2	(Yosefrinaldi, 2013)	Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Studi Empiris pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Se-Sumatera Barat)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh signifikan

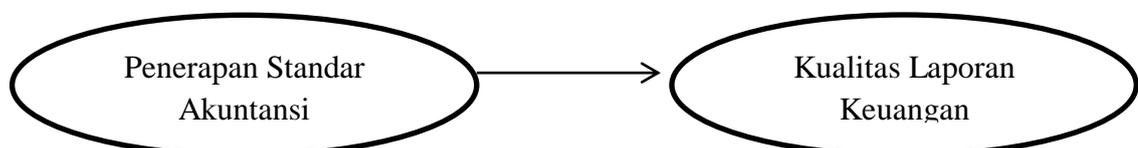
			positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
4	(Saragih, 2014)	Pengaruh penerapan akuntansi pemerintahan dan kualitas informasi akuntansi terhadap <i>good government governance</i> serta implikasinya terhadap kinerja keuangan pada skpd Se kota medan	Penerapan akuntansi pemerintahan dan kualitas informasi akuntansi mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap kinerja keuangan SKPD di Kota Medan. Pengaruh penerapan akuntansi pemerintahan dan kualitas informasi akuntansi terhadap kinerja keuangan SKPD di Kota Medan rendah yaitu sebesar 11,5%. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi pemerintahan dan kualitas informasi akuntansi yang baik belum mampu menjamin meningkatnya kinerja keuangan SKPD.
5	(Astuty, 2020)	Implementasi Good corporate governance Terhadap Kinerja keuangan bank	Hasil analisisregresi linier berganda yaituterdapat pengaruh positif antara kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan komite audit terhadapkinerja keuangan.Hasil analisis koefisien kolerasidandeterminasi menunjukkan adanya hubungan yang kuat. Hasil hipotesismenunjuk kan bahwa adanya pengaruh tidak signifikan antara implementasi Good Corporate Governanceterhadap kinerja keuangan pada PT Bank Sinarmas, Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
6	(Sari, 2018)	The Successful Implementation of Accounting Information	Hasil penelitian bahwa system informasi akuntansi berpengaruh

		System and the Quality of Government Financial Statement at Regencies and Cities in North Sumatera, Indonesia	terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah kota di provinsi Sumatera Utara
--	--	---	---

### 2.3 Kerangka Konseptual

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010, Standar akuntansi pemerintahan diartikan sebagai prinsip-prinsip akuntansi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), serta disusun dengan mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. Menurut (Nugraheni, 2013), menyatakan bahwa terdapat pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap peningkatan Kualitas Laporan Keuangan, dimana setelah penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional telah memuat seluruh informasi keuangan yang terjadi, dapat memecahkan semua permasalahan pencatatan keuangan, dan ada cara untuk memecahkan permasalahan pencatatan keuangan. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Permana, 2016), tentang pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan implikasinya pada akuntabilitas, mendapatkan hasil, yaitu terdapat hubungan antara Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) signifikan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan implikasinya terhadap akuntabilitas.

Berikut gambar kerangka konseptual dalam penelitian ini:



## **2.4 Perumusan Hipotesis Penelitian**

Hipotesis dapat didefinisikan sebagai jawaban sementara yang kebenarannya harus diuji atau rangkuman kesimpulan secara teoritis yang diperoleh melalui tinjauan pustaka (Martono, 2015). Berlakunya Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, menyatakan bahwa laporan dari pemerintah pusat dan daerah merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Dengan demikian laporan keuangan yang dihasilkan lembaga pemerintah akan lebih mudah dipahami serta dapat diukur tingkat kualitasnya berdasarkan SAP yang telah ditetapkan tersebut.

Ha : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

Ho : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah tidak memiliki pengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan asosiatif. Menurut (Juliandi et al., 2014) bahwa pendekatan asosiatif adalah suatu pendekatan dimana untuk mengkaji bagaimana suatu variabel memiliki keterkaitan atau mengetahui bahwa adanya hubungan atau pengaruh diantara kedua variabel (variable bebas dan variabel terikat)

#### 3.2 Definisi Operasional

Penelitian ini menggunakan dua variabel independen dan satu variabel dependen. Definisi operasional masing-masing variabel dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 3.1  
Definisi Operasional

Variabel	Definisi	Indikator	Jumlah Item Pertanyaan
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X)	Standar akuntansi pemerintahan (SAP) merupakan standar akuntansi pertama di Indonesia yang mengatur mengenai akuntansi pemerintahan Indonesia. Sehingga dengan adanya standar ini, maka laporan keuangan pemerintah yang merupakan hasil dari proses akuntansi diharapkan dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan	a. Mengungkapkan informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi b. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro c. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala	7

	<p>stakeholders sehingga tercipta pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel”.(Wijaya, 2019)</p>	<p>dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target</p> <p>d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya</p> <p>e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan</p> <p>f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan</p> <p>g. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan</p>	
--	---	---	--

Kualitas Laporan Keuangan (Y)	kriteria yang harus dimiliki Oleh pelaporan keuangan agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna, diantaranya adalah relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat dimengerti, tepat waktu dan biaya/manfaat (Jogi, 2012)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dapat dipahami,</li> <li>b. relevan.</li> <li>c. matrealitas,</li> <li>d. keandalan/reliabilitas,</li> <li>e. substansi mengungguli bentuk,</li> <li>f. pertimbangan yang sehat,</li> <li>g. kelengkapan,</li> <li>h. dapat dibandingkan,</li> <li>i. tepat waktu,</li> <li>j. keseimbangan antara biaya dan manfaat.</li> </ul>	10
-------------------------------	--	--	----

### 3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah yang beralamat di Jl. Lembaga No. 130,. Kelurahan, : Blang Kolak II,. Kecamatan, : Bebesen,. Kabupaten, : Aceh Tengah,. Provinsi, : Aceh,. Kode Pos, : 24519 dan penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus 2020 s/d November 2020

**Tabel 3.2**  
**Waktu Penelitian**

Kegiatan Penelitian	WAKTU PENELITIAN															
	Agustus				September				Oktober				November			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan judul		■														
Pembuatan proposal			■	■	■	■	■	■								
Bimbingan Proposal					■	■	■	■	■	■	■	■				
Seminar Proposal										■						
Pengumpulan Data											■					
Penyusunan Skripsi												■	■	■	■	■
Bimbingan Skripsi													■	■	■	■
Sidang Meja Hijau																■

### 3.4 Populasi dan Sampel

#### 3.4.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek /subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ASN di Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (DPKAD) pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dengan jumlah pegawai sebanyak 32 yang terdiri atas

**Tabel 3.3**  
**Populasi dan Sampel Penelitian**

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala	1
2	Sekretaris	1
3	Bidang Pengelola Keuangan	4
4	Bidang Penetapan	4
5	Bidang Pengelola aset	4
6	Bidang Unit Pelaksana	4
7	Bidang Penagihan dan Penertiban	4
8	Kelompok Jabatan Fungsional	10

#### 3.4.2 Sampel

Penelitian ini menggunakan teknik sampling probabilitas (probability) dimana merupakan teknik yang memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 32 responden, metode pemilihan sampel menggunakan sampel jenuh dimana semua anggota populasi dijadikan sampel hal tersebut dikarenakan bahwa jumlah populasi yang terlalu sedikit.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer melalui teknik pengambilan angket atau pengumpulan data penelitian dilaksanakan dari awal bulan Agustus 2020 sampai dengan akhir bulan November 2020. Pengumpulan data menggunakan metode kuisisioner yang didistribusikan oleh peneliti kepada responden secara langsung.

Setelah dilakukannya pengumpulan kuisisioner maka dari hasil kuisisioner maka diuji terlebih dahulu keabsahan kuisisioner dengan menggunakan uji validitas dan realibilitas sebagai berikut :

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini,yaitu :

#### 1. Kuisisioner (Angket).

Kuisisioner merupakan Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Para pegawai atau responden diobjek penelitian yaitu: pegawai Pada Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (DPKAD) pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah yang hasilnya merupakan data tertulis yang didapat dari pegawai tanpa tekanan dari pihak lain dengan menggunakan skala liker's dengan bentuk checklist, dimana setiap pertanyaan mempunyai 5 (Lima) opsi sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3-6 : Skala Pengukuran Likert**

Pernyataan	Bobot
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Kurang Setuju	3
Tidak Setuju	2
Sangat tidak Setuju	1

Agar hasil kuisioner dapat digunakan sebagai alat pengumpul data maka harus melewati uji validitas sebagai berikut:

a. Uji Validitas.

Pengujian Validitas digunakan untuk menentukan besar atau tidaknya instrument data yang diperoleh serta menentukan tingkat kevaliditasan instrument data. Untuk mengukur validitas setiap butir pertanyaan, maka digunakan teknik korelasi *product moment* yaitu :

$$r_{xy} = \frac{n(\sum x_i y_i) - (\sum x_i)(\sum y_i)}{\sqrt{[n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2][n \sum y_i^2 - (\sum y_i)^2]}}$$

(Sugiyono, 2016)

Dimana :

$r_{xy}$  = Besarnya Korelasi antara variabel x dan y

n = Banyaknya pasangan pengamatan.

$\sum x_i$  = Jumlah pengamatan variabel x.

$\sum y_i$  = Jumlah pengamatan variabel y.

$(\sum x_i^2)$  = Jumlah Kuadrat pengamatan variabel x.

$(\sum y_i^2)$  = Jumlah kuadrat pengamatan variabel y.

$\sum x_i y_i$  = Jumlah pengamatan variabel x dan y.

Ketentuan apakah suatu butir instrument valid atau tidak adalah melihat nilai probabilitas koefisien kerelasinya. Menurut (Juliandi, 2013) uji signifikansi dilakukan membandingkan nilai  $r_{hitung}$  dengan  $r_{tabel}$ . Jika  $r_{hitung}$  lebih besar dari  $r_{tabel}$  dan nilai positif maka butir atau pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid. Dengan cara lain yaitu dilihat dari nilai *sig (2 tailed)* dan membandingkan dengan taraf signifikan ( $\alpha$ ) yang ditentukan peneliti. Bila

nilai *Sig (2 tailed)*  $\leq 0,05$  maka butir instrumen valid, jika nilai *Sig (2 tailed)*  $\geq 0,05$  maka butir instrumen tidak valid.

#### b. Uji Reliabilitas

Uji reabilitas sebagai alat untuk mengukur suatu kuisioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah instrumen penelitian merupakan instrumen yang handal dan dapat dipercaya. Jika variabel penelitian menggunakan instrumen yang handal dan dapat dipercaya maka hasil penelitian juga dapat memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi.

$$\text{Rumus: } r_{11} = \left[ \frac{K}{(K-1)} \right] \left[ \frac{\sum \sigma b^2}{\omega^2} \right]$$

Keterangan :

r = Reliabilitas Instrumen

k = Banyaknya butir pertanyaan

$\sum \sigma_1^2$  = Jumlah varians butir

$\sigma_1^2$  = Varians total

Kriteria pengujiannya:

- a. Jika nilai koefisien reliabilitas yakni Alpha  $\geq 0,6$  maka reliabilitas cukup baik.
- b. Jika nilai koefisien reliabilitas Alpha  $\leq 0,6$  maka reliabilitas kurang baik.

Nilai reliabilitas instrumen diatas menunjukkan tingkat reliabilitas instrumen penelitian sudah memadai karena mendekati 1 ( $\geq 0,60$ ). Dapat disimpulkan bahwa butir pertanyaan dari masing-masing variabel sudah menjelaskan atau memberikan gambaran tentang variabel yang diteliti.

1. Wawancara (Inteview) Merupakan Melakukan tanya jawab dengan pimpinan perusahaan, Kepala bagian dan para Karyawan yang bersangkutan untuk memberikan data atau informasi yang ada hubungannya dengan penelitian ini.
2. Studi Dokumentasi  
Studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek yang bersangkutan.

### **3.6 Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik dengan menggunakan software SPSS 22.0 dengan tahapan sebagai berikut:

#### **1. Statistik Deskriptif**

Menurut (Ghozali, 2013), statistik deskriptif dapat mendeskriptifkan suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness. Pengujian statistic deskriptif merupakan proses analisis yang merupakan proses menyeleksi data sehingga data yang akan dianalisis memiliki distribusi normal.

#### **2. Regresi Linier Sederhana**

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan bantuan *Statistical Product and Service Solution* (SPSS) versi 22.0 for Windows. Untuk menguji hipotesis, dilakukan memprediksi variabel *multiple regression analysis* dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + X + e$$

Keterangan:

- $\alpha$  : Konstanta
- Y : Kualitas Laporan Keuangan
- X : Penerapan SAP
- e : Standar Error

### 3. Uji Hipotesis

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yang terdiri atas karakteristik manajemen dan penerapan standar akuntansi. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan dalam uji ini adalah sebagai berikut

1). Merumuskan hipotesis

H0 : tidak ada pengaruh penerapan SAP terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Ha : ada pengaruh penerapan SAP terhadap Kualitas Laporan Keuangan

2) Membandingkan hasil  $t_{sig}$  dengan nilai probabilitas  $\alpha$  0,05 dengan kriteria sebagai berikut:

Jika  $t_{sig} > \alpha$  0,05 berarti Ho diterima dan Ha Ditolak

Jika  $t_{sig} \leq \alpha$  0,05 berarti Ho ditolak. Dan Ha Diterima

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan:

t = nilai  $t_{hitung}$

$r_{xy}$  = korelasi xy yang ditemukan

n = jumlah sampel

#### 4. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat yaitu dengan mengkuadratkan koefisien yang ditemukan yaitu dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$D = R^2 \times 100\%$$

(Sugiyono, 2016)

Keterangan:

D = Determinasi

$R^2$  = Nilai korelasi berganda

100% = Persentase Kontribusi

## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

Dalam bab ini akan dibahas mengenai hasil penelitian studi lapangan yang dimulai dari statistik deskriptif yang berhubungan dengan data penelitian (meliputi gambaran umum responden, variabel penelitian, uji kualitas data, uji normalitas, dan asumsi klasik); hasil pengujian hipotesis dan pembahasan terhadap uji hipotesis yang diuji secara statistik dengan menggunakan program pengolahan data SPSS versi.22.0.

##### **4.1.1 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (DPKAD) pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah**

Pemerintah yang baik atau good governance merupakan suatu bentuk keberhasilan dalam menjalankan tugas untuk membangun negara sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Untuk pencapaian tujuan tersebut setiap pemerintah harus dapat mengelola sumberdaya yang ada di negara, salah satunya yang terpenting adalah keuangan.

instansi pemerintah wajib melakukan pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan keuangannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang didasarkan pada perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Dalam rangka pertanggungjawaban tersebut diperlukan penerapan pelaporan keuangan yang tepat, jelas dan terukur sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu diperlukan upaya reformasi dan pengembangan, khususnya di bidang akuntansi pemerintahan, yang berkesinambungan sehingga

terbentuk suatu sistem yang tepat. Dengan adanya laporan keuangan baik keuangan pusat maupun daerah diharapkan dapat dikelola dengan baik dalam rangka mengelola dana publik secara transparan, efisien, efektif dan akuntabel.

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) selaku pengguna anggaran diharuskan menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas yang berada dalam tanggungjawabnya. Pencatatan atas transaksi tersebut sebagai bahan dalam menyiapkan laporan keuangan SKPD.

Sesuai dengan amanat undang-undang no 17 tahun 2003 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

SAP diterapkan di lingkup pemerintahan, baik di pemerintah pusat dan departemen-departemenya maupun di pemerintahan daerah dan dinas-dinasnya. Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintahan pusat dan daerah.

Penerapan sistem keuangan pada prakteknya tidak terlepas dari persepsi, wawasan dan profesionalisme dari aparatur pemerintahannya itu sendiri. Hal ini berimplikasi terhadap laporan keuangan yang dibuat oleh setiap satuan kerja pemerintah. Kualitas dari laporan keuangan tersebut belum mendapatkan opini

yang wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kasus-kasus kelemahan SPI pada umumnya terjadi karena pejabat/pelaksana yang bertanggungjawab tidak/belum melakukan pencatatan secara akurat dan tidak menaati ketentuan dan prosedur yang ada, belum adanya kebijakan dan perlakuan akuntansi yang jelas, kurang cermat dalam melakukan perencanaan, belum melakukan koordinasi dengan pihak terkait, penetapan/pelaksanaan kebijakan yang tidak tepat, belum menetapkan prosedur kegiatan, serta lemah dalam pengawasan dan pengendalian.

Di bidang ekonomi, perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan mendorong perbaikan iklim investasi, sedangkan di bidang politik perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan mampu memperbaiki tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan bermanfaat untuk pemenuhan kebutuhan informasi keuangan secara umum yang lebih berkualitas bagi para pengguna laporan keuangan di dalam rangka menilai akuntabilitas dan memenuhi keputusan ekonomi, sosial maupun politik. Informasi keuangan pemerintah akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi serta akuntabilitas

#### **4.1.2 Deskriptif Hasil Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti mengolah data dalam bentuk angket yang terdiri dari 10 pernyataan untuk variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, 10 pernyataan untuk variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y). Angket yang disebar ini diberikan kepada 32 orang responden yaitu Pegawai tetap Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (DPKAD) Pemerintah Kabupaten

Aceh Tengah sebagai sampel penelitian dan dengan menggunakan *Likert Summated Rating* (LSR).

**Tabel. 4.1. Skala Likert**

PILIHAN JAWABAN	Skala Jawaban
▪ Sangat setuju	5
▪ Setuju	4
▪ Kurang setuju	3
▪ Tidak setuju	2
▪ Sangat tidak setuju	1

Dan ketentuan diatas berlaku dalam menghitung variabel pengelolaan dana desa dan kondisi kesejahteraan masyarakat.

#### 4.1.3 Karakteristik Responden

Berikut ini adalah karakteristik responden yang ada pada masyarakat di Desa Panompuan Jae.

**Tabel 4.2.  
Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-laki	14 Orang	43%
2	Perempuan	18 Orang	57%
	Jumlah	32 Orang	100%

Sumber: Hasil Penelitian (2021)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa responden terdiri dari 14 orang laki-laki (43%) dan 18 orang perempuan (57%) dari total keseluruhan 32 orang responden.

**Tabel 4.3.  
Distribusi Responden Berdasarkan Usia**

No	Usia	Jumlah	Persentase (%)
1	< 25 Tahun	2 Orang	6%
2	25-35 Tahun	11 Orang	34%
3	36-45 Tahun	13 Orang	41%
4	> 45 Tahun	6 Orang	19%
	Jumlah	32 Orang	100%

Sumber: Hasil Penelitian (2021)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa responden terdiri dari 2 orang yang berusia < 25 tahun atau sebesar (6%), 11 orang yang berusia 25-35 tahun atau sebesar (34%),13 orang yang berusia 36-45 tahun atau sebesar (41%) dan > 45 tahun sebanyak 6 orang (19%).

**Tabel 4.4**  
**Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	SMP-SMA	1 Orang	3 %
2	D1-D3	8 Orang	25 %
3	S1-S3	23 Orang	72 %
	Jumlah	32 Orang	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa responden terdiri dari 1 orang berpendidikan SMP-SMA atau sebesar (3%), 8 orang berpendidikan D1-D3 atau sebesar (25%), 23 orang berpendidikan S1-S3 atau sebesar (72%).

#### **4.1.4 Deskripsi Variabel Penelitian**

##### **a. Variabel Pengelolaan Dana Desa**

Pada penelitian ini penulis menyebarkan angket kepada seluruh responden yang berjumlah 32 orang. Dimana responden dalam penelitian ini adalah pegawai Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Pada penelitian ini pula penulis menggunakan *questioner* sebagai alat untuk menganalisa data agar dapat menghasilkan penelitian yang berguna.

**Tabel 4.5**  
**Tabulasi Jawaban Responden Variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah(X)**

No	Pernyataan	SS		S		KS		TS		STS		Jumlah	
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	Pimpinan selalu melakukan pemeriksaan terhadap catatan akuntansi, fisik kas, barang, dan secara terus menerus melakukan penilaian terhadap kualitas pengendalian intern	3	9,4	22	68,8	7	21,9	0	0	0	0	32	100
2	SKPD telah memiliki standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam instansi.	3	9,4	27	84,4	2	6,3	0	0	0	0	32	100
3	Pimpinan telah melakukan analisis risiko secara lengkap dan menyeluruh terhadap kemungkinan timbulnya pelanggaran terhadap sistem akuntansi.	3	9,4	26	81,3	3	9,4	0	0	0	0	32	100
4	Pimpinan selalu memiliki rencana pengelolaan atau mengurangi risiko pelanggaran terhadap sistem dan prosedur akuntansi.	6	18,8	24	75,0	2	6,3	0	0	0	0	32	100
5	Kebijakan maupun prosedur pengamanan fisik atas asset telah ditetapkan dengan baik dan pengeluaran uang pada SKPD selalu didokumentasikan pada bukti pengeluaran Kas	6	18,8	26	81,3	0	0	0	0	0	0	32	100
6	Instansi Pemerintah telah mengembangkan rencana untuk identifikasi maupun pengamanan atas asset infrastruktur dan semua transaksi yang diproses kedalam komputer adalah transaksi yang telah diotorisasi	5	15,6	20	62,5	7	21,9	0	0	0	0	32	100
7	Informasi telah disediakan secara tepat waktu dan saluran komunikasi telah dilaksanakan secara efektif	2	6,3	24	75,0	5	15,6	1	3,1	0	0	32	100
8	Pengguna anggaran/pemegang kas pada masing-masing SKPD telah menyampaikan	29	90,6	3	9,4	0	0	0	0	0	0	32	100

	Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tepat pada waktunya												
9	SKPD selalu menindaklanjuti setiap hasil temuan/reviu maupun saran yang diberikan oleh BPK/Inspektorat, dan sebagai tindak lanjut dari penilaian terhadap kualitas pengendalian intern, SKPD melakukan perbaikan pengendalian intern	2	6,3	24	75,0	5	15,6	1	3,1	0	0	32	100
10	Pimpinan selalu mereviu dan mengevaluasi temuan yang menunjukkan adanya kelemahan dan perlu perbaikan	3	9,4	25	78,1	4	12,5	0	0	0	0	32	100

**Sumber : Data diolah (2021)**

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah responden banyak yang menjawab setuju seperti pada pernyataan item 1 sampai dengan 10 berikut ini:

1. Jawaban responden tentang Pimpinan selalu melakukan pemeriksaan terhadap catatan akuntansi, fisik kas, barang, dan secara terus menerus melakukan penilaian terhadap kualitas pengendalian intern, sebagian besar responden menjawab setuju 68,8%.
2. Jawaban responden SKPD telah memiliki standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam instansi, sebagian besar responden menjawab setuju 84,4%.
3. Jawaban responden tentang Pimpinan telah melakukan analisis risiko secara lengkap dan menyeluruh terhadap kemungkinan timbulnya pelanggaran terhadap sistem akuntansi, sebagian besar responden menjawab setuju 81,3%.

4. Jawaban responden tentang Pimpinan selalu memiliki rencana pengelolaan atau mengurangi risiko pelanggaran terhadap sistem dan prosedur akuntansi, sebagian besar responden menjawab setuju 75,0%.
5. Jawaban responden tentang Kebijakan maupun prosedur pengamanan fisik atas aset telah ditetapkan dengan baik dan pengeluaran uang pada SKPD selalu didokumentasikan pada bukti pengeluaran Kas, sebagian besar responden menjawab setuju 81,3 %.
6. Jawaban responden tentang Instansi Pemerintah telah mengembangkan rencana untuk identifikasi maupun pengamanan atas asset infrastruktur dan semua transaksi yang diproses kedalam komputer adalah transaksi yang telah diotorisasi, sebagian besar responden menjawab setuju 62,5%.
7. Jawaban responden tentang Informasi telah disediakan secara tepat waktu dan saluran komunikasi telah dilaksanakan secara efektif, sebagian besar responden menjawab setuju 75,0 %.
8. Jawaban responden tentang Pengguna anggaran/pemegang kas pada masing-masing SKPD telah menyampaikan Surat Pertanggungjawaban(SPJ) tepat pada waktunya, sebagian besar responden menjawab setuju 90,6%.
9. Jawaban responden tentang SKPD selalu menindaklanjuti setiap hasil temuan/reviu maupun saran yang diberikan oleh BPK/Inspektorat, dan sebagai tindak lanjut dari penilaian terhadap kualitas pengendalian intern, SKPD melakukan perbaikan pengendalian intern, responden menjawab setuju 85,3%.

10. Jawaban responden tentang Pimpinan selalu mereviu dan mengevaluasi temuan yang menunjukkan adanya kelemahan dan perlu perbaikan, sebagian besar responden menjawab setuju 78,1 %.

#### b. Variabel Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses kegiatan akuntansi yang mampu memberikan suatu informasi keuangan yang dapat dipahami oleh pemakai dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dimasa yang akan datang. Pada penelitian ini penulis menyebarkan angket kepada seluruh responden yang berjumlah 32 orang pegawai Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Berikut ini hasil questioner mengenai kualitas pelaporan keuangan.

**Tabel 4.6**  
**Tabulasi Jawaban Responden Kualitas Laporan Keuangan(Y)**

No	Pernyataan	SS		S		KS		TS		STS		Jumlah	
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	Laporan keuangan disusun sesuai dengan SAP, dengan informasi yang lengkap mencakup semua informasi akuntansi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.	1	3.1	26	81.3	5	15.6	0	0	0	0	32	100
2	Laporan keuangan disusun selesai secara tepat waktu sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan saat ini dan mengoreksi keputusan masa lalu ( <i>feedback value</i> ).	3	9.4	17	53.1	12	37.5	0	0	0	0	32	100
3	Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan telah benar dan memenuhi kebutuhan para pengguna	1	3.1	31	96.9	0	0	0	0	0	0	32	100

	dan tidak berpihak pada kepentingan pihak tertentu sehingga teruji kebenarannya.												
4	Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan menggambarkan dengan jujur transaksi dan peristiwa lainnya sehingga bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang bersifat material.	2	6.3	27	84.4	3	9.4	0	0	0	0	32	100
5	Informasi yang termuat dalam laporan keuangan yang disusun selalu dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.	4	12.5	25	78.1	3	9.4	0	0	0	0	32	100
6	Dalam penyusunan laporan keuangan, saya telah menggunakan kebijakan akuntansi yang berpedoman pada SAP dari tahun ke tahun.	3	9.4	28	87.5	1	3.1	0	0	0	0	32	100
7	Laporan yang saya buat disusun secara sistematis sehingga mudah dimengerti dan dipahami	11	34.4	20	62.5	1	3.1	0	0	0	0	32	100
8	Informasi yang saya sajikan dalam laporan keuangan telah jelas dan disajikan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.	4	12.5	28	87.5	0	0	0	0	0	0	32	100
9	Laporan keuangan pada instansi tempat Saya bekerja, telah menyediakan informasi yang mampu memprediksi masa yang akan datang.	4	12.5	25	78.1	3	9.4	0	0	0	0	32	100
10	Informasi yang dilaporkan dalam laporan keuangan pada instansi tempat Saya bekerja telah bebas dari pengertian yang	3	9.4	27	84.4	2	6.3	0	0	0	0	32	100

menyesatkan.													
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Sumber : Data diolah (2021)**

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa variabel kualitas laporan keuangan responden banyak yang menjawab setuju, hal ini kualitas laporan keuangan yang disajikan sudah baik sehingga responden menjawab setuju. Berikut adalah penjelasan dari jawaban responden:

1. Jawaban responden tentang Laporan keuangan disusun sesuai dengan SAP, dengan informasi yang lengkap mencakup semua informasi akuntansi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan, mayoritas responden menjawab setuju 81.3%
2. Jawaban responden tentang Laporan keuangan disusun selesai secara tepat waktu sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan saat ini dan mengoreksi keputusan masa lalu (*feedback value*), mayoritas responden menjawab setuju 53.1%
3. Jawaban responden tentang Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan telah benar dan memenuhi kebutuhan para pengguna dan tidak berpihak pada kepentingan pihak tertentu sehingga teruji kebenarannya, sebagian besar responden menjawab setuju 96.9%
4. Jawaban responden tentang Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan menggambarkan dengan jujur transaksi dan peristiwa lainnya sehingga bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang bersifat material, sebagian besar responden menjawab setuju 84.4%.
5. Jawaban responden tentang Informasi yang termuat dalam laporan keuangan yang disusun selalu dapat dibandingkan dengan laporan

keuangan periode sebelumnya, sebagian besar responden menjawab setuju 78.1%.

6. Jawaban responden tentang Dalam penyusunan laporan keuangan, saya telah menggunakan kebijakan akuntansi yang berpedoman pada SAP dari tahun ke tahun, mayoritas responden menjawab sangat setuju 87.5%.
7. Jawaban responden tentang Laporan yang saya buat disusun secara sistematis sehingga mudah dimengerti dan dipahami, sebagian besar responden menjawab sangat setuju 62.5%.
8. Jawaban responden tentang Informasi yang saya sajikan dalam laporan keuangan telah jelas dan disajikan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna, sebagian besar responden menjawab setuju 87.5%.
9. Jawaban responden tentang laporan keuangan pada instansi tempat Saya bekerja, telah menyediakan informasi yang mampu memprediksi masa yang akan datang, sebagian besar responden menjawab setuju 78.1%.
10. Jawaban responden tentang Informasi yang dilaporkan dalam laporan keuangan pada instansi tempat Saya bekerja telah bebas dari pengertian yang menyesatkan, sebagian besar responden menjawab setuju 84.4%.

#### **4.1.1. Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif merupakan analisis yang paling mendasar untuk menggambarkan keadaan data secara umum. Statistik deskriptif ini meliputi beberapa hal sub menu deskriptif statistik seperti frekuensi, deskriptif, eksplorasi data, tabulasi silang dan analisis rasio yang menggunakan Minimum, Maksimum, Mean, Median, Mode, Standard Deviasi.

#### 4.1.2. Uji Validitas

Pengujian Validitas dilakukan untuk mengetahui valid atau tidaknya instrumen penelitian yang telah dibuat dan disebarikan kepada 32 responden pada pegawai Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur untuk menguji validitas data yang diperoleh digunakan *factor analysis* melalui *varimax rotation*. Item yang dimasukkan dalam analisis adalah item yang memiliki *factor loading*  $>0,05$  (Hair,2016).

**Tabel IV.7**  
**Uji Validitas X**

Pernyataan	Nilai Korelasi	R <sub>tabel</sub>	Keterangan
Pernyataan 1	0,726 (positif)	0,349	Valid
Pernyataan 2	0,594 (positif)	0,349	Valid
Pernyataan 3	0,562 (positif)	0,349	Valid
Pernyataan 4	0,771 (positif)	0,349	Valid
Pernyataan 5	0,354 (positif)	0,349	Valid
Pernyataan 6	0,388 (positif)	0,349	Valid
Pernyataan 7	0,625 (positif)	0,349	Valid
Pernyataan 8	0,383 (positif)	0,349	Valid
Pernyataan 9	0,393(positif)	0,349	Valid
Pernyataan 10	0,359 (positif)	0,349	Valid

Sumber : Data Diolah SPSS (2021)

Dari 10 pernyataan mengenai penerapatan standar akuntansi pemerintah yang diajukan penulis kepada responden, 10 pernyataan dinyatakan valid.

**Tabel IV.8**  
**Tabel Uji Validitas Y**

Pernyataan	Nilai Korelasi	R <sub>tabel</sub>	Keterangan
Pernyataan 1	0,569 (positif)	0,349	Valid
Pernyataan 2	0,520 (positif)	0,349	Valid
Pernyataan 3	0,449 (positif)	0,349	Valid
Pernyataan 4	0,534 (positif)	0,349	Valid
Pernyataan 5	0,409 (positif)	0,349	Valid
Pernyataan 6	0,634 (positif)	0,349	Valid
Pernyataan 7	0,480 (positif)	0,349	Valid
Pernyataan 8	0,408 (positif)	0,349	Valid
Pernyataan 9	0,547 (positif)	0,349	Valid
Pernyataan 10	0,485 (positif)	0,349	Valid

Sumber : Data Diolah SPSS (2021)

Dari 10 pernyataan mengenai kondisi kualitas laporan keuangan berupa ketanggapan yang diajukan penulis kepada responden, 10 pernyataan dinyatakan valid.

#### 4.1.3. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur kuisioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Kuisioner dikatakan reliabel atau handal. Berikut ini adalah hasil uji reliabilitas masing-masing variabel sebagai berikut:

**Tabel IV.9**  
**Tabel Uji Reliabilitas**

Variabel	Nilai Alpha	Status
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X)	0,717	Reliabel
Kualitas laporan keuangan (Y)	0,682	Reliabel

Sumber : Data Penelitian (Diolah)

Nilai reliabilitas instrumen di atas menunjukkan tingkat reliabilitas instrumen penelitian sudah memadai karena mendekati 1 (>0,60).

#### 4.1.4. Analisis Regresi

Berdasarkan hasil pengujian asumsi klasik disimpulkan bahwa model regresi yang dipakai dalam penelitian ini telah memenuhi model estimasi yang *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE) dan layak dilakukan analisis regresi. Untuk menguji hipotesis, peneliti menggunakan analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan program SPSS 22, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

##### a. Persamaan Regresi

Sugiyono (2013:298) Dalam pengolahan data dengan menggunakan regresi linier, dilakukan beberapa tahapan untuk mencari hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, melalui pengaruh pengelolaan dana desa terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan program SPSS Versi 22, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 4.10**  
**Coefficients**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	26.100	5.168	
Penerapan SAP	.354	.130	.445

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan tabel diatas didapatlah persamaan regresi sebagai berikut

$$Y = 26,100 + 0,354X + e$$

Keterangan:

1. konstanta sebesar 26,100 menunjukkan bahwa apabila variabel independen (= 0) maka nilai kualitas laporan keuangan sebesar 26,100.
2.  $\beta$  sebesar 0,354 menunjukkan bahwa setiap penerapan standar akuntansi pemerintah mengalami kenaikan 0,354 sebesar 1% akan diikuti oleh peningkatan kualitas laporan keuangan sebesar 0,354 dengan asumsi variabel lain tetap.

#### 4.1.5. Uji Hipotesis

##### a. Uji t

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi konstanta dan setiap variabel independennya. Dengan kriteria sebagai berikut :

- 1) Bila  $\text{Sig} > 0.05$ , maka  $H_0$  = diterima, sehingga tidak ada pengaruh signifikan antara variabel bebas dan terikat
- 2) Bila  $\text{sig} < 0.05$ , maka  $H_0$  = ditolak, sehingga ada pengaruh signifikan antara variabel bebas dan terikat
- 3) Bila  $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ , maka  $H_0$  = ditolak sehingga ada pengaruh signifikan antara variabel bebas dan terikat
- 4) Bila  $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ , maka  $H_0$  = diterima sehingga ada pengaruh signifikan antara variabel bebas dan terikat

Dari hasil penelitian ini variabel diperoleh

Hipotesis : pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap kondisi keajahteraan masyarakat

**Tabel 4.11**  
**Uji t**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	26.100	5.168		5.051	.000
Penerapan SAP	.354	.130	.445	2.725	.011

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

$$t_{hitung} > t_{tabel} (2,725 > 2,042)$$

Nilai signifikansi  $0,011 < 0,05$

Maka  $H_0$  ditolak sehingga penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.

#### 4.1.6. Koefisien Determinasi

Nilai koefisien korelasi (R) menunjukkan seberapa besar korelasi atau hubungan antara variabel-variabel independen dengan variabel dependen. Koefisien korelasi dikatakan kuat apabila data nilai R berada diantara 0,5 dan mendekati 1. Koefisien determinasi (*R Square*) menunjukkan seberapa besar variabel independen menjelaskan variabel dependennya. Nilai *R Square* adalah 0 sampai dengan 1. Apabila nilai *R Square* semakin mendekati 1, maka variabel-variabel independen mendekati semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Sebaliknya, semakin kecil nilai *R Square* maka kemampuan variabel-variabel independen untuk menjelaskan variasi variabel dependen semakin terbatas. Nilai *R Square* memiliki kelemahan yaitu nilai *R Square* akan meningkat setiap ada penambahan satu variabel

dependen meskipun variabel independen tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

**Tabel IV.12**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
dimension0 1	.445 <sup>a</sup>	.198	.172	1.79224	.198	7.426	1	30	.011	2.229

a. Predictors: (Constant), Penarapan SAP

b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Adjusted R Square adalah berfungsi untuk mengukur seberapa besar tingkat keyakinan penambahan variabel independen yang tepat untuk menambah daya prediksi model. Dari hasil penelitian nilai adjust R Square sebesar 0,198 berarti 19,8% penerapan standar akuntansi pemerintah mempengaruhi kualitas laporan keuangan sementara sisanya 80,2% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak masuk dalam model penelitian ini.

#### 4.2 Pembahasan

Dari tabel regresi dapat dilihat besarnya  $t_{hitung}$  untuk penerapan standar akuntansi pemerintah sebesar 2,725 dengan nilai signifikan 0,011, sedangkan  $t_{tabel}$  adalah 2,042, sehingga  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $2,725 > 2,042$ ), maka penerapan standar akuntansi pemerintah menunjukkan angka  $< 0,05$  ( $0,011 < 0,05$ ), maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diberikan diatas dan berdasarkan hasil dari pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten

Aceh Tengah, maka dapat dikatakan bahwa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah belum seluruhnya memenuhi kriteria Laporan Keuangan yang berkualitas. Hal ini dikarenakan pemerintah kabupaten aceh tengah tidak Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Selain penataan keuangan daerah belum sepenuhnya memadai masih ada permasalahan lain terkait pengelolaan barang milik daerah yang hingga saat ini masih belum terselesaikan diantaranya mulai dari proses perencanaan yang belum berdasarkan standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah, penilaian barang milik daerah yang belum tuntas disebabkan barang yang diusulkan tidak keseluruhan dinilai, penghapusan yang masih menunggu regulasi, pengamanan barang milik daerah yang belum seluruhnya di dukung bukti kepemilikan serta masih lemahnya pengawasan karena masih banyaknya barang yang hilang, meskipun demikian Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah terusberupaya melakukan pembenahan dari segi pengelolaan barang milik daerah yang memadai.

Pengelolaan barang milik daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Hal ini meliputi aspek Penyalahgunaan Uang Persediaan (UP) pada Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah hal ini dikarenakan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pengamanan dan pemeliharaan, pemanfaatan, penilaian, dan penghapusan barang milik daerah yang kurangsesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga menimbulkan inefisiensi dan kemubaziran.

Pengelolaan barang milik daerah oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah yang belum sepenuhnya terlaksana dengan baik dihadapkan beberapa kendala dibidang organisasi, sumber daya aparatur, aturan dan praktek manajemen pengelolaan barang yang belum sesuai dengan aturan yang ada.

Mengingat laporan keuangan yang berkualitas merupakan wujud pertanggungjawaban pengelola keuangan publik dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang berisi salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan standar akuntansi yang diterima secara umum.

Laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kabupaten Aceh Tengah merupakan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan atas kegiatan ekonomi pemerintah daerah yang harus disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan didukung dengan disahkannya Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Penyajian Laporan Keuangan Berbasis Akrual. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah yang diterapkan pada laporan keuangan yang dihasilkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah akan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Mengingat PP No.71 tahun 2010 merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah.

Di samping itu penelitian yang dilakukan oleh Permana (2011), Kusumah (2012), Juwita (2013), dan Rahayu,dkk (2014) jugamemperoleh hasil bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa standar akuntansi pemerintahan sudah diterapkan dengan baik oleh dinas-dinas pada pemerintah daerah sehingga kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah semakin baik karena pada dasarnya kualitas laporan keuangan yang baik adalah sesuai dengan SAP yaitu relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan.

## **BAB 5**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari hasil pembahasan pada bab 4 maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Hal ini dikarenakan aparat pemerintah telah melaksanakan tentang standar akuntansi pemerintah dengan baik guna meningkatkan kualitas laporan keuangannya
2. Besarnya pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sebesar 19,8% sementara sisanya 80,2% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak masuk dalam model penelitian ini.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian maka saran dalam penelitian ini adalah

1. Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini sumber-sumber dan referensi yang terkait secara langsung dengan penelitian yang digunakan masih kurang. Oleh karena itu, bagi peneliti selanjutnya agar lebih memperbanyak lagi sumber-sumber dan referensi yang akurat terkait dengan permasalahan yang diangkat.

2. Bagi Instansi Pemerintah disarankan untuk lebih banyak melakukan pelatihan kepada staf/pegawai agar lebih dapat memahami tentang keuangan, akuntansi dan teknologi agar laporan keuangan dapat disajikan secara andal dan tepat waktu.
3. Diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah agar dapat meningkatkan Kinerja Laporan Keuangan ditahun berikutnya sehingga dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian.
4. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti masalah yang sama, dianjurkan meneliti pada subjek yang lain, dengan menambah variabel – variabel lain dalam judul penelitian ini,

## DAFTAR PUSTAKA

- Amries, P., & Tanjung, R. (2015). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada SKPD Kota Dumai). *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 2(2), 1–15.
- Assauri, S. (2015). *Manajemen Pemasaran*. Raja Grafindo Persada.
- Astuty, W. (2020). Implementasi Good corporate governance Terhadap Kinerja keuangan Bank. *Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers*, 509–516.
- Fahmi, I. (2013). *Analisis Laporan Keuangan*. Alfabeta.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Edisi Kedua*. Universitas Diponegoro.
- Harahap, S. S. (2011). *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Raja Grafindo Persada.
- Inapty, M. A. F. B. A. (2016). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur Dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 9(1), 27–42.
- Jogi, Y. (2012). Kompetensi dan Independensi Akuntan Publik. Refleksi Hasil Penelitian Empiris. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2), 79–92.
- Juliandi, A., Irfan, & Mnurung, S. (2014). *METODOLOGI PENELITIAN BISNIS Konsep dan Aplikasi* (F. Zulkarnain (ed.); pertama). UMSU Press.
- Kusumah, A. A. (2016). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei pada SKPD/OPD Pemerintahan Kota Tasikmalaya). *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 2(1), 1–10.
- Martono. (2015). *Manajemen Keuangan. Edisi Kedua, Cetakan. Pertama*. EKONISIA.
- Nugraheni, P. dan S. I. (2013). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 13(1), 32–54.
- Permana, S. A. (2016). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Opini Pada, Audit Terhadap Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Indonesia, Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek 2015, Tahun 2013 –2015. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 3(1), 1–15.
- Pura, R. (2014). *Pengantar Akuntansi 1 Pendekatan Siklus Akuntansi*. Erlangga.

- Purba, M. P. (2010). *International Financial Reporting Standards Konvergensi dan Kendala Aplikasinya di Indonesia*. Graha Ilmu.
- Rudianto. (2012). *Pengantar Akuntansi Konsep & Teknik Penyusunan Laporan Keuangan*. Penerbit Erlangga.
- Saragih, F. (2014). Pengaruh Penerapan Akuntansi Pemerintahan dan kualitas informasi akuntansi terhadap good Government Governance serta Implikasinya terhadap Kinerja Keuangan pada SKPD Se kota Medan. *Prosiding Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, 1–34.
- Sari, E. N. (2018). Implementation of Accounting Information System and the Quality of Government Financial Statement at Regencies and Cities in North Sumatera, Indonesia. *Journal International Business Management*, 12(4), 346–352.
- Subagyo, Masruroh, N. A., & Batian, I. (2018). *akuntansi manajemen berbasis desain* (Junaedi (ed.)). Gadjah Mada University Press.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Thomas. (2013). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sebwang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung. *EJurnal Pemerintahan Integratif*, 1(1), 51–64.
- Wati, E. L. dan N. A. (2014). Pengaruh indepedensi, Gaya Kepemimpinan, Komitmen Organisasi, dan Pemahaman Good Governance Terhadap Kinerja Auditor Pemerintah (Studi Pada Auditor Pemerintah di BPKP Perwakilan Bengkulu). *SNA XIII Purwokerto*.
- Wijaya, H. (2019). Standar Akuntansi Pemerintahan (PP No.24 Tahun 2005) Untuk Pengelolaan Keuangan Negara Yang Transparan dan Akuntabel. *Jurnal Akuntansi*, 7(3), 313–323.
- Yosefrinaldi. (2013). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Studi Empiris Pada DPKAD Se-Sumatera Barat). *Jurnal Akuntansi*, 1(1), 1–24.  
<http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/66>